



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

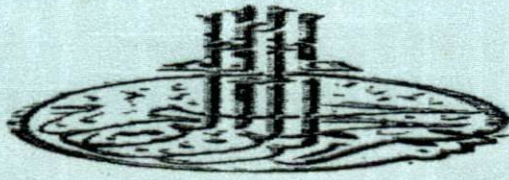
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH SUMATERA BARAT PERIODE 1993-2008

SKRIPSI



YUDI HARDIAN
05 151 046

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



LEMBARAN PERSEMBAHAN

*"Allah memberikan hikmah ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendaki-Nya
barang siapa yang mendapat hikmah-Mu sesungguhnya ia telah menciptakan
kebijakan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang-orang yang berakal."
(Q.S. Al Baqarah : 269)*

*"Orang paling utama di antara manusia adalah mukmin yang mempunyai ilmu,
dimana kalau dibutuhkan orang dia membawa manfaat atau memberi
petunjuk dan dikala sedang tidak dibutuhkan dia memperkaya
atau menambah sendiri pengetahuannya"
(HR. Baihaqi)*

*Alhamdulillah
Sekeping cita-cita telah kuraih
Setitik kebahagiaan karenanya telah kurnikmati
Seiring dengan rasa syukurku kepada-Mu ya Allah
Atas apa yang telah Engkau limpahkan
Sungguh karunia-Mu itu tak terhingga
Terimakasih ya Allah*

*Setetes keringat orang tua mempunyai banyak makna,
Ada do'a, kasih sayang, kelembutan, harapan dan cinta.
Sepenggal harapan akan tercermin dalam setiap tutur kata yang
Terucap dan sebuah harapan akan tertintasi dalam do'a yang diucapkan.
"Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta dan Abangku dan kakakku tersayang"*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat. Semoga mendapat keberkahan disisi Allah SWT dan dapat bermanfaat dalam kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, saran, dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta abangku Yolly Chamella,ST dan kakakku Yossi Ovacia,SE, terima kasih atas suppor yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing, selaku Ketua Jurusan : Program Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr.Hafrizal Handra,M.Soc.Sc selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan, nasehat, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof.Dr.Elfindri, SE.MA, MM selaku pembimbing akademik penulis
6. Bapak H. Masrizal.M.Soc.SC dan Bapak Drs. Zulkarnain Ras,MSi selaku tim penguji pada ujian komprehensif yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak dan ibuk seluruh staf administrasi di lingkungan Program Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

8. Seluruh staf pengajar fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Google dengan cepat, jelas memberikan data-data dan sekaligus menjadi nara sumber dalam peneliab skripsi ini.
10. Meta Herlinda,SH, thank's atas perhatian,dukungan, semangat dan do'a nya demi kesuksesan penulis.
11. Kak Soraya Thank's atas bantuan dan waktunya kak...
12. Sahabatku Fajar Martha Nasution,SE, thank's sob.....!!!! atas bimbingan an waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini. **JANGAN LUPA** 3 tahun lai di bulan mei awak **holiday gratis** jer.....
13. Rekan-rekan ku seperjuangan di JIE 05 baik yang sudah tamat maupun belum. Bagi yang belum tetap semangat teman jangan lupa raih mimpi mu, focus lah lai....**alah kini tu mah.....TeTap Semangat Teman.....!!!!**
14. Uda-uda,uni2 dan adiak2 di JIE dan FEUA terima kasih kebersamaan kita selama ini dapat memberi arti yang berharga bagi kehidupan kita masing-masing.
15. Uda2 toserba,terima kasih atas bimbingan dan waktu nya da.....
16. Bagi rekan rekan wisudan/wati IE Eko Adeaqto Opero,SE; da Ulva Elzumar,SE; da aristik,SE;da ade SE; Da koko,SE; da aristik,SE; Puja,SE, Debi,SE; Jeffry SE. dan SE SE lainnya. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan. Amin.....Amin Ya Robbal ALamin.
17. Teman KKN Ku yang seperjuangan di negeri antah berantah, terima kasih atas kebersamaannya.
18. Teman-teman kos **BOTAK** terima ksh atas semuanya, berkat kalian skripsi ini akhirnya selesai juga.
19. Untuk teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa mengurangi arti dengan tidak menyebutkan satu persatu seluruh rekan yang kenal dan mengenal penulis. Semoga bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan di masa yang akan datang.

Wassalam,
Padang, Juni 2011

Yudi Hardian

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

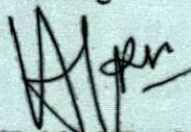
Dengan ini, Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan pembimbing skripsi menyatakan bahwa:

Nama : **Yudi Hardian**
No. BP : **05 151 046**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Program Studi : **Strata 1 (S-1)**
Jalur Konsentrasi : **Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat (1993-2008)**

Telah diseminarkan dan setuju skripsinya melalui seminar hasil skripsi yang diadakan tanggal 09 mei 2011, sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dan dinyatakan lulus.

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc

NIP. 196510201993021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas Andalas

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, MA **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Sc. DEA, Ing**

NIP. 19541009198021001

NIP. 130 812 952

	No.Alumni Universitas	Yudi Hardian	No.Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/27 Desember 1986 b) Nama Orang Tua : Chairuddin (Ayah), Yusnimar (Ibu) c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 05 151 046 f) Tgl.Lulus : 06 Mei 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.02 i) Lama Studi : 5 Tahun 9 Bulan j) Alamat Orang Tua : kotopanjang, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.		

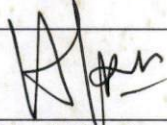
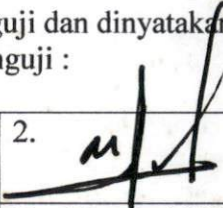
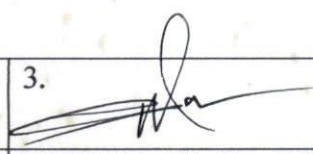
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEM.PENGARUHI DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH SUMATERA BARAT PERIODE 1993-2008

Skripsi S-1 Oleh Yudi hardian, Pembimbing, Dr.Hefrizal Handra,M.Soc.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat periode 1993-2008. Selain itu penelitian ini juga menerapkan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan analisis kuantitatif untuk melihat signifikasi variabel secara individual dan variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat otonomi fiskal dipengaruhi secara signifikan oleh investasi pemerintah secara langsung. Sedangkan Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat di pengaruhi secara tidak signifikan oleh investasi swastanya. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi oleh PDRB. Faktor yang paling dominan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat adalah investasi pemerintah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 09 Mei 2011.
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Dr.Hafrizal Handra,M.Soc.Sc	Drs.Masrizal,M.Soc.Sc	Drs.Zulkarnain Ras, MSi

Mengetahui,

Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing

NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7

BAB II. KERANGKA TEORI.....	8
2.1 Desentralisasi Fiskal	8
2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal.....	12
2.3 Keuangan Daerah	14
2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16
2.5 Investasi	17
2.6 Studi Empiris.....	23

BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	25
3.2 Definisi Operasional.....	26
3.2.1 Variabel Terikat.....	26
3.2.2 Variabel Bebas.....	26
3.3 Teknik Analisa	27

3.4 Alat Uji.....	30
3.5 Analisis Deskriptif	31
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS	32
4.1 Analisis Deskriptif	32
4.1.1 Derajat Otonomi Fiskal	32
4.1.2 Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat	34
4.1.3 perkembangan investasi Pemerintah dan investasi swasta (PMDN & PMA).....	37
4.2 Analisa Regresi	40
4.2.1 koefisien Determinasi (R^2)	40
4.2.2 Uji F-test	42
4.2.3 uji T-test.....	42
4.3 Uji Asumsi Klasik	43
4.3.1 Uji Heteroskedastisitas	43
4.4.2 Uji Autokorelasi	44
4.4.3 Uji Multikolinearitas	45
4.4.4 Uji Normalitas.....	46
4.4 Analisis Regresi Terpisah	47
4.4.1 Hasil Regresi Variabel Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF)	47
4.4.2 Hasil Regresi Variabel PDRB Terhadap Derajat Otonomi Fiskal...	48
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	33
Tabel 4.2	Perkembangan PDRBProvinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1993-2008.....	35
Tabel 4.3	Perkembangan Investasi Pemerintah Di Sumatera Barat Tahun 1993-2008	38
Tabel 4.4	Perkembangan Investasi Swasta (PMDN dan PMA)di Sumatera Barat.	39
Tabel 4.5	Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 5.1	Uji Multikolieritas	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 1993-2008.....	36
Gambar 5.1	Uji Autokolerasi Durbin Watson.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Regres.....	53
Lampiran 2	Hasil Regres Terpisah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan (*power sharing*) maupun desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*). Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah;
- b. Berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta

- c. Terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soedjito dalam Mulyanto, 2002: 1-2).

Dengan ditetapkannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Kapasitas aparat daerah;
- b. Kapasitas kelembagaan daerah;
- c. Kapasitas keuangan daerah, dan
- d. Kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah.

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom

terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya. Tetapi mengharapkan PAD sebagai sumber utama sehingga peranannya mencapai katakanlah 90 % adalah sesuatu yang mustahil, Sumatera Barat memiliki persentase PAD masih rendah, dimana persentase PAD terbesar selama periode 2000-2004 sebesar 54,84 persen pada tahun 2004. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Untuk mengurangi ketergantungan finansial tersebut Pemda harus merancang dan menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan PAD, yang meliputi:

1. Intensifikasi dan esktsensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak,
2. Eksplorasi sumber daya alam, dan
3. Skema pembentukan kapital (capital formation) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Dari ketiga pilihan kebijakan ini, tampaknya skim menarik investor merupakan suatu pilihan yang paling bersifat *sustainable* dan mempunyai *economic multiplier effects* yang bermanfaat, yaitu *employment creation*. Pilihan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan inflasi, sedangkan pilihan kedua, terutama jika sumber daya yang tersedia bersifat *non-renewable*, akan terbentur pada persoalan keberlanjutan (Irawan, 2002:1).

Di Sumatera Barat sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha (Mulyanto, 2002:5-7).

Investasi ini juga merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah dan pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Persentase Laju pertumbuhan PDRB selalu meningkat setiap tahunnya. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan

investasi ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Suryana, 2000:109). Dilihat dari perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta (PMDN&PMA) diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi pemerintah yang terbesar dilihat dalam periode tahun 1993-2008 adalah investasi pemerintah yang ditanam pada tahun 2006 sebesar 1.513493,80 juta rupiah. Dan Investasi Swasta (PMDN&PMA) yang terbesar selama periode 1993-2008 adalah investasi yang ditanamkan pada tahun 2005 sebesar 1.448.203,76 juta rupiah.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan mendasar pada kebijakan pembangunan hampir semua sektor di Sumatera Barat ini, seperti, sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi. Pada sektor-sektor tersebut, kebijakan dan arah pembangunan akan lebih banyak ditentukan oleh daerah. Hal ini menimbulkan peluang pengembangan produksi sesuai dengan potensi wilayah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila dilihat pola struktur ekonomi Sumatera Barat secara umum dapat diketahui bahwa perekonomian daerah sumatera Barat masih didominasi oleh sektor Pertanian/Primer. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Sumatera Barat. Berdasarkan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penerimaan daerah juga akhirnya akan mengalami peningkatan pula.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini antara lain :

1. Sejauh mana Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan PDRB mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
2. Sejauh mana Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
3. Sejauh mana PDRB mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
4. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis:

1. Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
2. Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
3. Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
4. Menganalisis Faktor yang dominan mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, menambah wawasan ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
2. Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
3. Bagi masyarakat luas dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian tiap-tiap bab sebagai berikut:

- BAB I** :Berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** :Berisi tentang kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.
- BAB III** :Membahas tentang metodologi penelitian.
- BAB IV** :Berisi hasil dan analisis yang menggambarkan tentang analisis deskriptif dan analisis regresi dari variabel yang di teliti.
- BAB V** :Merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Desentralisasi Fiskal

Sistem administrasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai oleh dua pendekatan: dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi ialah administrasi daerah dan fungsi pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat. Desentralisasi ialah fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih.

Beberapa konsep desentralisasi yang dikemukakan diantaranya, Soejito dalam Sarundajang (2002:45), Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Pendapat lainnya dari Koswara dalam Sarundajang (2002:45) mengemukakan bahwa pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya, baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan,

sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksana, baik *personal* maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan.

Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*) terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, dan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*), Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*), Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*). Desentralisasi administratif yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.

Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) (Sidik, 2002:2) bentuk, yaitu :

- 1) Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.
- 2) Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya.

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.

- 3) Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang

menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

Dengan demikian Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang dikelompokkan menjadi dekonsentrasi, devolusi dan delegasi. Secara konsep ketiga pengertian tersebut memberikan penjelasan mengenai proses dari desentralisasi itu sendiri berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi Fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan publik di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (7) dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pasal 1 ayat (8) “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia”.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke

instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah (Bird, 2000:4).

Yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah Suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal/ Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Menurut Halim (2001:22) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai

pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Daerah adalah suatu tingkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Ukuran yang digunakan adalah *administration Independency ratio* antar PAD dengan total APBD, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Radianto dalam Anas, 2002:26)

$$DOF = \frac{PAD}{APBD - DAU} \times 100 \%$$

Dimana:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

2.3 Keuangan Daerah

Menurut Yani (2002:229) “Keuangan Daerah merupakan Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ketentuan tentang keuangan daerah diatur didalam bab tersendiri, yakni pada bab VIII Keuangan Daerah, yang terdiri atas pasal 155 sampai pasal 194. dalam pasal 155 ayat (1) ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD, maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan

yang ada di daerah, disamping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota (Abdullah, 2002:45).

Dalam Penjelasan umum disebutkan bahwa “penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah”.

Sumber penerimaan daerah ini diatur dalam bab tersendiri pada UU No. 33 Tahun 2004, yakni pada bab IV pasal 5 :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli daerah;
 - b. Dana perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang berbeda dalam menyatakan kemampuan daerah dan melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan daerah. Diantaranya

menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang independen, seperti misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi. Makin besar kemampuan daerah dalam sumber pendapatannya maka akan memperkecil kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya alokasi yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Susiyati, 1994:29).

Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi (*grant*) yang di drop dari pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002:39). Salah satu perubahan penting dalam melihat potensi dan dinamika perekonomian daerah adalah PAD.

2.4 PDRB (Produk Domestik regional Bruto)

Desentralisasi fiskal ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidakstabilan harga-harga. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di suatu daerah diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi (*grant*) yang di drop dari Pusat (Aswin, 2005:4).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dapat diukur dari kinerja finansial pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam hal ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB dapat menjelaskan tiga pengertian, yaitu Pengertian Produksi, Pendapatan, Dan Pengeluaran. Secara garis besar, PDRB merupakan nilai tambah barang atau jasa yang dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir atau yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

2.5 Investasi

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, salah satu fenomena dari hubungan antara sistem pemerintah Daerah (Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat dari aspek keuangan: Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda. Pembangunan daerah terutama fisik cukup pesat akan tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari

pembangunan juga semakin besar (Kuncoro, 2004:18). Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominanya transfer dari pusat.

Untuk mengurangi ketergantungan finansial tersebut Pemda harus merancang dan menerapkan berbagai skim peningkatan PAD. Secara umum, skim tersebut meliputi: 1) Intensifikasi dan eskensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, 2) Eksplorasi sumber daya alam, dan 3) Skema pembentukan kapital (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. Dari ketiga pilihan kebijakan ini, tampaknya skim menarik investor merupakan suatu pilihan yang paling bersifat *sustainable* dan mempunyai *economic multiplier effects* yang bermanfaat, yaitu *employment creation*. Pilihan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan inflasi, sedangkan pilihan kedua, terutama jika sumber daya yang tersedia bersifat *non-renewable*, akan terbentur pada persoalan keberlanjutan (Irawan, 2002:1).

Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*),

fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*).

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Dalam hal investasi pemerintah daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No.22/1999; dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dibiayai atas beban APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya dalam pasal 79 UU No.22/1999 dan juga pada pasal 3 dan 4 UU No.25/1999 telah digariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: (i) Pendapatan asli daerah, -yaitu: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 6 dipisahkan, serta (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-; (ii) Dana perimbangan; (iii) Pinjaman daerah; serta (iv) Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mulyanto, 2002 : 5-7).

Secara umum investasi dapat dibagi atas dua bagian utama yaitu Investasi Swasta (*Private Investment*) dan Investasi Pemerintah (*Public Investment*). Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Investasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga.

Investasi pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah dalam suatu negara. Pemerintah dalam hal ini meliputi pemerintah pusat, propinsi, kota dan kabupaten dengan segala aparatnya. Dalam bidang sosial, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, pemberian pekerjaan, bantuan bagi korban bencana alam, yatim piatu dan jompo. Dalam bidang pemerintahan dan keamanan memberikan perlindungan dan ketertiban hukum. Dalam bidang ekonomi membangun sarana dan prasarana perbankan, asuransi, pendeknya berbagai macam pelayanan dan jasa sebagian besar tidak disediakan oleh pihak lain atau swasta. Peningkatan investasi pemerintah akan mempengaruhi investasi yang dilakukan swasta secara positif.

Investasi juga merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan arti kata, besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranannya ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian (Sukirno, 2000:367-368).

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2000:107).

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Suryana, 2000:109). Selain itu Investasi

menurut Budiono (1985:40) adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk membeli barang-barang atau jasa dan tujuan investasi yaitu menambah stok digudang atau untuk perluasan pabrik.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor pemerintah atau swasta untuk tujuan menambah persediaan atau stok yang ada digudang, untuk perluasan pabrik, perusahaan, membeli mesin-mesin, membangun perumahan baru dan untuk menambah alat-alat produksi baru.

Investasi dapat dirinci menurut sektor (sektor pertanian, penggalian, industri dan sebagainya) bahkan dapat dirinci menurut komoditi, ataupun menurut institusi yang melakukan investasi (pemerintah umum, BUMN/D, swasta dan rumah tangga). Investasi pemerintah dapat dibedakan menjadi investasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Sedangkan investasi swasta dan rumah tangga dapat dibedakan menjadi investasi perusahaan fasilitas (PMA dan PMDN), investasi perusahaan non fasilitas, dan investasi rumah tangga. Investasi yang dilakukan itu akan memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah.

2.6 Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Anas (2002:86) menunjukkan peningkatan komponen sektor lapangan usaha yang ada pada PDRB, ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan PAD kota Padang, akan tetapi pengaruh peningkatan PAD terhadap besaran pertumbuhan DOF sangat signifikan.

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Paisal (2003:80) terdapat pengaruh yang signifikan antara Investasi Pemerintah dan Investasi Sektor Swasta terhadap total PDRB Sumatera Barat. Pada penelitian ini terlihat bahwa investasi yang ditanamkan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan suatu usaha untuk melihat tingkat pembangunan bidang ekonomi di daerah Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur berdasarkan PDRB berdasarkan harga konstan suatu daerah. Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan suatu daerah. Peran tersebut terlihat dari kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Roy Bahl (1999) mengemukakan beberapa aturan yang dapat diimplementasikan untuk melaksanakan otonomi fiskal. Peraturan pertama yaitu otonomi fiskal merupakan suatu sistem yang harus dilakukan secara komprehensif. Kedua kondisi keuangan harus sesuai dengan fungsi otonomi fiskal. Berikutnya adalah adanya kemampuan yang kuat dari pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kegiatan otonomi tersebut. Selanjutnya peraturan yang harus diperhatikan yaitu sebuah sistem pemerintahan yang terpusat tidak dapat menyelesaikan permasalahan antar desa dan kota. Otonomi fiskal membutuhkan kekuatan pemerintah daerah dalam masalah

perpajakan. Pemerintah pusat harus tetap menjaga pelaksanaan otonomi fiskal yang telah dibuat. Model transfer fiskal yang dilakukan pemerintah pusat harus sesuai dengan tujuan dari otonomi fiskal. Peraturan berikutnya terkait dengan kebijakan anggaran yang ketat, mengenali sistem pemerintahan yang selalu harus sesuai rencana yang telah dibuat. Peraturan yang terakhir adalah otonomi fiskal yang dilakukan harus berhasil membawa kesejahteraan pada masyarakat.

Penelitian Nobuo Akai (2007) mengenai implikasi dari otonomi fiskal untuk kestabilan ekonomi, menemukan bahwa otonomi fiskal mengurangi fluktuasi dari pertumbuhan PDB yang juga meningkatkan kegiatan hukum. Nobuo Akai menggunakan data panel dari 50 negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1992-1997. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif dan signifikan antara otonomi fiskal dan volatilitas ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif tahunan pada periode 1993-2008. Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari berbagai sumber seperti misalnya Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Sumatera Barat, dan BKPPMD serta instansi-instansi lain yang terkait. Disamping itu penulis melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal ekonomi, Perpustakaan Universitas Andalas, serta dari berbagai buku ekonomi yang menunjang terhadap penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Research Library Observation, dari Universitas Andalas.
2. Penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengutip, mencatat, memphoto copy, dari berbagai publikasi.
3. Selain itu sumber penulisan ini juga didapat dari internet.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan' pemerintah propinsi Sumatera Barat maka, penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif dan asosiatif. Menurut Irawan (1999:60) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau

menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sedangkan penelitian asosiatif maksudnya menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Derajat Otonomi Fiskal (Y).

Derajat Otonomi Fiskal (Y) adalah suatu tingkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD (Radianto dalam Anas, 2002:26).

Derajat Otonomi Fiskal

$$DOF = \frac{PAD}{APBD - DAU} \times 100 \%$$

dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

3.2.2 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel bebas atau variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Investasi Pemerintah (G), Investasi Swasta (I), dan PDRB (Y).

1. Investasi Pemerintah (G) adalah pengeluaran pemerintah didalam alokasi atau pengeluaran pemerintah di dalam membiayai pembangunan. Investasi Pemerintah berasal dari pemerintah pusat melalui dana sektoral dan

pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun kabupaten/kota. Data investasi ini dalam satuan Rupiah.

2. Investasi swasta (I), investasi yang dikeluarkan oleh sektor swasta/non pemerintah (khususnya PMDN dan PMA) didalam sektor ekonomi dalam menanamkan modalnya di daerah Sumatera Barat. Satuan datanya dalam bentuk Rupiah.
3. Pertumbuhan ekonomi (PDRB), yang dilihat dengan PDRB yaitu jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Satuannya dalam bentuk Rupiah.

3.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel dan grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung. Data dari buku teks, jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan skripsi ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.
2. Kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dalam angka.

Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model analisis regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) (Hoover & Sheffrin, 1992, dalam Prakosa, 2004) yang digunakan untuk melihat pengaruh investasi pemerintah (G), investasi swasta (I) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB)

terhadap derajat otonomi fiskal (DOF) dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan *Eviews 3.0*. Data yang digunakan adalah data periode tahunan (*time series*) dengan estimasi model menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu teknik mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Dalam regresi berganda, variabel independennya lebih dari satu variabel, serta memiliki satu variabel dependen. (Nugroho, 2005).

Model regresi sederhana dan berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk persamaan-persamaan berikut : Pengujian Hipotesis 1 (H_1) digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh investasi pemerintah (G) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF). (Nugroho, 2005).

$$H_1: DOF = \alpha + b_1 G + e$$

Dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

α = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi

G = Investasi Pemerintah

e = error terms

Pengujian Hipotesis 2 (H_2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi swasta (I) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF).

$$H_2: \quad DOF = \alpha + b_2 I + e$$

Dimana :

b_2 = Koefisien Regresi

I = Investasi Swasta

Pengujian Hipotesis 3 (H_3) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF).

$$H_3: \quad DOF = \alpha + b_3 Y + e$$

Dimana :

b_3 = Koefisien Regresi

Y = Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian Hipotesis selanjutnya (H_3) adalah regresi berganda yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh investasi pemerintah (G), investasi swasta (I) dan pertumbuhan ekonomi ($PDRB$) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF)

$$DOF = \alpha_0 + \alpha_{1Log} G_1 + \alpha_{2Log} I_2 + \alpha_{3Log} PDRB_3 + e$$

dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

G_1 = Investasi Pemerintah

I_2 = Investasi Swasta

$PDRB_3$ = Pertumbuhan Ekonomi

e = Faktor pengganggu

Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*) artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan BLUE, maka harus memenuhi empat asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linear berganda, yaitu:

- 1) Tidak boleh ada autokorelasi;
- 2) Tidak boleh ada heteroskedastisitas;
- 3) Tidak boleh ada multikolinearitas;
- 4) Data terdistribusi normal.

3.4 Alat Uji

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Nilai R mendekati 1).
2. Uji statistik t, menunjukkan pengaruh masing - masing variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat.
3. Uji statistik F, melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel terikat.
4. Uji Normalitas, untuk mengetahui residual hasil regresi terdistribusi secara normal atau tidak.
5. Uji Multikolinier untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya dengan nilai $< 0,85$.
6. Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas

Uji Autokorelasi untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. Teknik yang digunakan adalah uji Durbin - Watson.

3.5 Analisis Deskriptif

Dilakukan dengan maksud mendeskripsikan apa yang ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang ditemukan di lapangan. Terdiri atas penyajian data dalam tabel, menghitung persentase, nilai pemusatan dan dispersi data.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Analisis Deskriptif

4.1.1 Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah suatu tingkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Ukuran yang digunakan adalah *administration Independency ratio* antara PAD dengan total APBD, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Dari Tabel 4.1 dibawah dapat dilihat bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 sangat berfluktuatif. Pada periode 1997 sampai dengan 2001 Derajat Otonomi fiskal Daerah Sumatera Barat selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, bahkan penurunannya sampai mencapai angka 49,16 persen kondisi ini terjadi pada tahun 2001.

Hal ini merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai tanggal 1 januari 2001, fenomenanya adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat, Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*Local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan

penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Derajat Otonomi Fiskal yang paling tinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 49,94 persen dari 37,96 persen pada tahun 2002 dengan laju pertumbuhan sebesar 31,56 persen.

Tabel 4.1
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Propinsi Sumatera Barat

Tahun	DOF	Laju Pertumbuhan %
1993	73.64	
1994	78.72	6.90
1995	66.93	-14.98
1996	75.00	12.06
1997	67.34	-10.21
1998	60.77	-9.76
1999	59.93	-1.38
2000	59.09	-1.40
2001	30.04	-49.16
2002	37.96	26.36
2003	49.94	31.56
2004	54.84	9.81
2005	64.18	17.03
2006	32.10	-27.34
2007	28.86	-10.09
2008	28.94	0.27

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2006

Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat senantiasa menunjukkan perkembangan yang tidak menggembirakan yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan yang negatif, dimana rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2007. Namun pada tahun 2008 derajat otonomi fiskal kembali meningkat menjadi 28,94 dari 28,86 pada tahun 2007.

4.1.2 Perkembangan Perekonomian Daerah Sumatera Barat

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*valueadded*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Dalam penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Kondisi perekonomian Sumatera Barat selama kurun waktu 1993-2008 sangat berfluktuasi. Sebelum krisis ekonomi selama kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 1997 senantiasa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif.

Seperti terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini, perekonomian Sumatera Barat pada tahun 1993 tercatat sebesar Rp. 17.532.612,41 juta dan pada tahun 1997 tercatat sebesar Rp. 23.262.957,30 juta, meskipun berfluktuasi pertumbuhan

ekonomi selama kurun waktu tersebut (1993-1997) menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 4.2
Perkembangan PDRB Propinsi Sumatera Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1993-2008
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan (%)
1993	17,532,612.41	
1994	18,838,174.12	7.45
1995	20,521,202.43	8.93
1996	22,125,484.83	7.81
1997	23,262,957.30	5.14
1998	21,696,893.19	-6.73
1999	22,041,491.90	1.59
2000	22,889,614.05	3.85
2001	23,727,373.93	3.66
2002	24,840,187.76	4.69
2003	26,146,781.63	5.26
2004	27,578,136.56	5.47
2005	29,159,480.53	5.73
2006	30,949,945.10	6.14
2007	32,912,968.59	6.34
2008	35,007,921.57	6.36

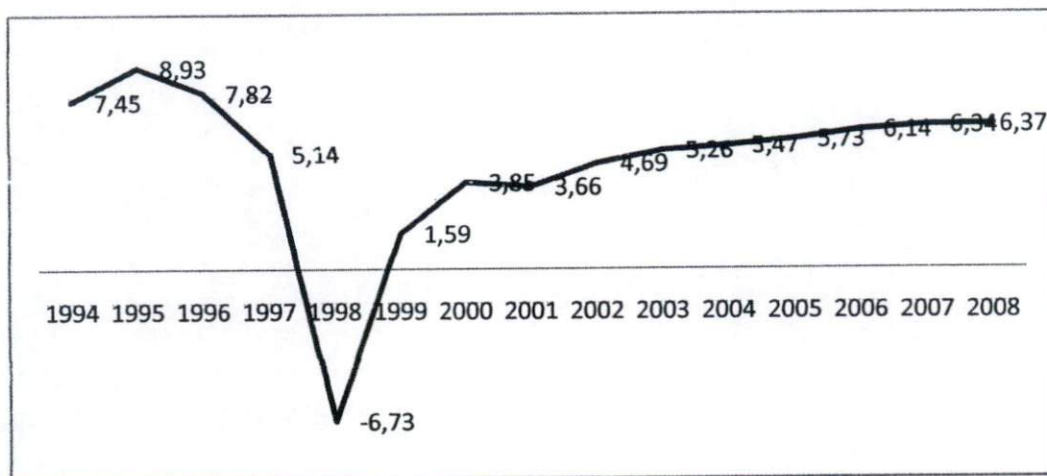
Sumber : BPS Sumatera Barat, (diolah)

Tetapi tatkala Indonesia dilanda krisis pertengahan tahun 1997 perekonomian Sumatera Barat juga mengalami kemunduran. Seluruh sektor hanya mampu menghasilkan output sebesar Rp. 21.696.893,19 juta atau mengalami pertumbuhan minus sebesar -6.73 persen. Hal ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Inflasi), yang mengakibatkan naiknya harga-harga sehingga perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Dalam sejarah perekonomian Indonesia terutama sejak rezim orde baru,

kemerosotan yang terjadi hingga mencapai pertumbuhan negatif baru sekali dialami yakni pada tahun 1998.

Grafik 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 1993-2008



Selama periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1995 sebesar 8,93 persen, meningkat dari Rp18.838.174,12 juta pada tahun 1994 menjadi Rp. 20.521.202,43 juta pada tahun 1995. sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 1,59 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat adalah 4,78 persen pertahun. Pertumbuhan Ekonomi semenjak pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001 menunjukkan trend yang semakin meningkat tetapi pergerakan masih terlihat lambat hingga tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,36 persen.

4.1.3 Perkembangan Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta (PMDN&PMA)

Investasi merupakan salah satu indikator utama ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perekonomian. Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan dunia usaha (swasta) akan dapat menggerakkan perekonomian pada sektor riil dan ini berarti akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta.

Berdasarkan tabel 4.3 di bawah perkembangan Investasi pemerintah di Sumatera Barat selama kurun waktu 1993 sampai dengan 2008 sangat berfluktuasi. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 investasi pemerintah selalu mengalami penurunan hingga mencapai 26,06 persen yaitu pada tahun 1999 yang merupakan penurunan terbesar dalam periode ini, hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang dikenal dengan krisis ekonomi.

Tabel 4.3
Perkembangan Investasi Pemerintah Yang Telah Terealisasi
Di Sumatera Barat Tahun 1993-2008

Tahun	Investasi Pemerintah (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1993	241.409,70	
1994	445.717,30	84.63
1995	688.403,80	54.45
1996	639.718,80	-7.07
1997	641.379,90	0.26
1998	980.920,80	52.94
1999	725.318,10	-26.06
2000	493.040,90	-22.02
2001	825.352,40	67.40
2002	1.033.536,80	25.22
2003	1.166.909,20	12.90
2004	1.264.579,70	8.37
2005	1.335.791,50	5.63
2006	1.513.493,80	13.30
2007	1.200.976,40	-20.65
2008	1.423.247,00	18.51

Sumber : BPS Sumatera Barat (diolah)

Sejak pelaksanaan desentralisasi Fiskal tahun 2001 Investasi Pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahunnya. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan Investasi pemerintah Sumatera Barat sebesar 17,19 persen pertahun. Peningkatan investasi pemerintah daerah akan memberikan peluang dan mendorong investor swasta baik dalam maupun asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Dan pada akhirnya investasi pemerintah dan swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.4
Perkembangan Investasi Swasta (PMDN dan PMA) Yang Telah Terealisasi
di Sumatera Barat Tahun 1993-2008

Tahun	PMDN&PMA (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1993	257.311,62	
1994	279.579,57	8.65
1995	348.129,52	24.52
1996	275.800,73	-20.78
1997	578.789,26	109.86
1998	685.383,23	18.42
1999	914.079,31	33.37
2000	757.184,32	-17.16
2001	1.302.923,39	72.07
2002	1.408.087,45	8.07
2003	452.827,06	-67.84
2004	906.091,56	100.10
2005	1.448.203,76	59.83
2006	1.023.418,59	-29.33
2007	724.714,99	-29.19
2008	834.776.10	15.19

Sumber : BKPPMD Sumatera Barat

Berdasarkan tabel Perkembangan Investasi swasta (PMDN dan PMA) di atas, selama kurun waktu 1993-2008 investasi yang ditanamkan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sejak diberlakukannya otonomi Daerah pada tahun 2001 Investasi yang ditanamkan oleh PMDN dan PMA senantiasa meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 67,84 persen, turun dari Rp. 1.408.087,45 juta pada tahun 2002 menjadi Rp. 452.827,06 juta pada tahun 2003. Namun pada tahun 2004 Investasi yang ditanamkan oleh PMDN dan PMA ini kembali meningkat dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 100,10 persen.

Secara rata-rata tingkat pertumbuhan Investasi swasta Sumatera Barat sebesar 19,05 persen pertahun. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup tinggi tentunya bila dibandingkan dengan investasi pemerintah yang hanya berkisar 17,19 persen perhaunnya.

4.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui seberapa efektif investasi swasta (I), investasi pemerintah (G) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dalam mempengaruhi derajat otonomi fiskal (DOF) di propinsi Sumatera Barat, maka dilakukan analisis regresi terhadap persamaan, sedangkan metode yang digunakan dalam regresi adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan data times series tahunan. Setelah dilakukan regresi terhadap data, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$DOF = 548.3206 + 3.041843\text{Log}I + 14.70428\text{Log}G \\ + 12.73855\text{Log}PDRB$$

$$t\text{-statistic} = (5.260400) \quad (0.892047) \quad (2.080931) \quad (2.480876)$$

$$R^2 = 0.811711$$

$$R^2 \text{ Adjusted} = 0.760360$$

$$F\text{-statistic} = 15.80698$$

4.2.1 Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R² sebesar 0.811711 yang berarti bahwa sebesar 81,17% variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Atau dengan kata lain, sebesar 81,17% variabel investasi swasta, investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan derajat otonomi fiskal, sisanya sebesar 18,83% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar model

yang digunakan. Investasi swasta (I) mempunyai hubungan yang positif dengan derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 3.041843, Artinya dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan, maka investasi swasta (I) akan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal, sedangkan arti 3.041843 yaitu kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 3,04 persen, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

Variabel investasi pemerintah (G) mempunyai hubungan yang positif dengan derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 14.70428, Artinya dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan, maka investasi pemerintah (G) akan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal. Sedangkan arti 14.70428 yaitu kenaikan investasi pemerintah sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 14,7 persen.

Sama halnya dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang mempunyai hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal dengan koefisien 12.73855, artinya dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan maka pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal. Sedangkan arti angka 12.73855, yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 12.74 persen.

4.2.2 Uji *F-test*

Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} < F\text{-tabel}$. Dari hasil penelitian didapatkan nilai $F\text{-test}$ sebesar 15.80698 sedangkan $F\text{-tabel}$ dihitung dengan cara $df1 = k-1$, dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah jumlah data, sehingga didapatkan nilai $F\text{-tabel}(3:11)$ sebesar 3.59. Hal ini menunjukkan nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$, dan bisa dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan) derajat otonomi fiskal dipengaruhi oleh investasi swasta, investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 Uji *T-test*

Masing-masing variabel independen secara individual (*parsial*) mempengaruhi variabel dependen jika $T\text{-test} > T\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individual (*parsial*) tidak mempengaruhi variabel dependen jika $T\text{-test} < T\text{-tabel}$. Dari hasil regresi diperoleh nilai $T\text{-test } I = 0.892047$, $T\text{-test } G = 2.080931$ dan $T\text{-test } Y = 2.480876$, Sedangkan $T\text{-tabel}$ dihitung dengan cara $df1 = 1/2\alpha$, dan $df2 = n-k$ sehingga didapatkan nilai $T\text{-tabel}(0,025:11)$ sebesar 1,796. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa:

- Investasi swasta (I) secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi derajat otonomi fiskal (DOF) sebab $T\text{-test} < T\text{-tabel}$.
- Investasi pemerintah (G) secara statistik signifikan dalam mempengaruhi derajat otonomi fiskal (DOF) sebab $T\text{-test} > T\text{-tabel}$.

- Pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara statistik signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal (DOF) sebab $T\text{-test} > T\text{-tabel}$

Untuk melihat pengaruh variabel secara parsial dapat juga dilihat dari nilai probabilitas. Dengan menguji dua sisi maka nilai probabilitas tidak perlu dibagi dua karena nilai probabilitasnya lebih dari tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 10 % karena nilai probabilitasnya sebesar 0,3915. Sedangkan variabel investasi pemerintah signifikan pada tingkat kepercayaan 10% dengan probability 0,0616 dan variabel pertumbuhan ekonomi signifikan dalam tingkat kepercayaan 5% dimana probability-nya 0,0305.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas (variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan) yaitu dengan menggunakan Uji *white heteroscedasticity no cross term* dimana jika chi-squared probability ($\text{Obs} \times R\text{-squared}$) > 0.05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.694714	Probability	0.662052
Obs*R-squared	5.138298	Probability	0.526202

Sumber : data diolah

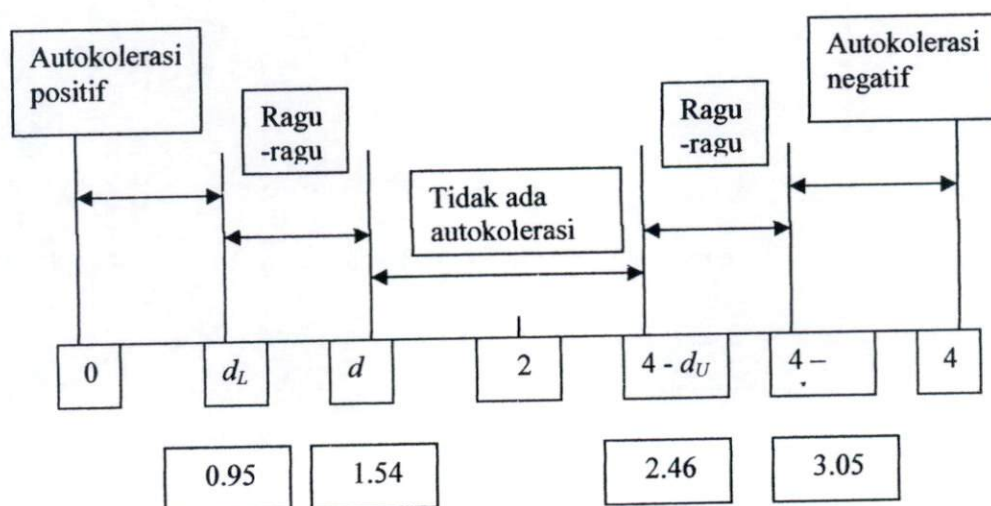
Dari tabel terlihat bahwa probability (Obs*R squared) lebih besar ($0.526202 > 0,05$) sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi berarti adanya korelasi antara satu variabel pengganggu dengan variabel pengganggu lainnya (Widarjono, 2005). Dalam konteks regresi, apabila faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh karena itu, bila pengamatan-pengamatan yang dilakukan sepanjang waktu, pengaruh faktor pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu tidak terbawa pada periode waktu berikutnya. Ini dinamakan tidak ada autokorelasi. Adanya korelasi antara variabel gangguan mengakibatkan penaksir tidak lagi efisien baik dalam sample kecil maupun sample besar. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari bagan I dibawah ini.

Gambar 5.1

Uji Autokorelasi Durbin Watson



Dari hasil regresi didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.958414 dan dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai $dL=1.30$, dan $dU=1.57$ sehingga nilai $(4-dU) = 2.43$ dan nilai $(4-dL) = 2.70$. Dari bagan I diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (1.958414) terletak pada daerah tidak ada autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear antara beberapa atau semua variabel penjelas dalam suatu model regresi. Menurut Frisch, 1934(dalam Widarjono,2005), suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan, sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi. Jika menginginkan model yang bersifat BLUE, maka tidak boleh terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini yaitu dengan menggunakan *Correlation Matrix* (r) masing-masing variabel baik independen maupun dependen. Hasil Uji Multikolinearitas dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Multikolinearitas

	I	G	Y
I	1.000000	0.111210	0.320555
G	0.111210	1.000000	0.736833
Y	0.320555	0.736833	1.000000

Sumber : data diolah

Model dinyatakan terkena multikolinearitas jika r (absolute) $> 0,85$ (Widarjono,2005). Dari tabel tidak terdapat r (nilai absolute) yang besar dari 0,85% sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dari nilai *skewness* yaitu kecondongan (kemiringan) suatu kurva. Data yang terdistribusi mendekati normal akan memiliki nilai *skewness* yang mendekati angka nol sehingga memiliki kemiringan yang cenderung seimbang (Nugroho, 2005).

Dari hasil regresi didapatkan nilai *skewness* yang mendekati nol yaitu sebesar - 0,22893 sehingga bisa dinyatakan bahwa model terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian. Normalitas data juga dapat dilihat dari nilai probabilitas J-B statistik. Data yang terdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai probabilitas J-B statistik yang lebih besar dari 0.05 (pada alpha 5%) (Sriwinarti,2004). Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas J-B statistik sebesar 0,393778 yang lebih besar dari 0.05, berarti menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.4 Analisis Regresi Terpisah

4.4.1 Hasil Regresi variabel Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (*DOF*)

Pada penelitian ini, untuk melihat hubungan antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap derajat otonomi fiskal dilakukan regresi sebagai berikut :

$$DOF = 1.767212 + 0.067847 \text{ Log}G + 0.110566 \text{ Log}I$$
$$(4,331020) \quad (1,255742) \quad (4,224003)$$

Dari hasil regresi terlihat bahwa variabel investasi pemerintah memiliki hubungan positif terhadap derajat otonomi fiskal dengan koefisien sebesar 0,067847, yang memiliki arti peningkatan investasi pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan derajat otonomi fiskal sebesar 0,067847%. Begitu juga dengan variabel investasi swasta memiliki hubungan positif terhadap derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 0,110566, yang mengindikasikan kenaikan 1% investasi swasta akan meningkatkan derajat otonomi fiskal sebesar 0,110566%.

4.4.2 Hasil Regresi variabel PDRB Terhadap Derajat Otonomi Fiskal

Untuk melihat hubungan antara variabel PDRB terhadap derajat otonomi fiskal dapat dilihat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$DOF = 0.048694 + 0.006843\text{Log}PDRB$$

(0,048694) (0,006843)

Hasil regresi diatas menunjukkan variabel PDRB memiliki hubungan positif terhadap derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 0,006843, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% PDRB akan meningkatkan derajat otonomi fiskal sebesar 0,006843%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut, bahwasanya Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat dipengaruhi secara positif oleh investasi pemerintah, investasi swasta dan PDRB. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai 2008 cenderung menurun. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak yang di timbulkan oleh adanya Desentralisasi Fiskal. Tingkat ketergantungan Daerah terhadap pusat masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.

Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi secara signifikan oleh investasi pemerintah secara langsung. Sedangkan Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat di pengaruhi secara tidak signifikan oleh investasi swastanya. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi oleh PDRB. Hal ini terbukti dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} -. Kondisi ini berarti setiap peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat adalah investasi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan secara langsung pengaruh antara variabel investasi pemerintah, investasi swasta dan PDRB terhadap derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian yang dikemukakan diatas, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Agar kebijakan pemerintah dalam bentuk investasi pemerintah dapat diupayakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan dapat menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat,
2. pemerintah perlu berupaya untuk menarik investor, sehingga meningkatkan investasi swasta dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, iklim investasi serta mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan penanaman modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akai, Nobuo dkk. 2007. *Fiscal Decentralization and Economic Volatility-Evidence from State-Level Cross-section Data of The United Stated*.
- Anas, Anidar. 2002. *Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Padang*. Tesis : Program Ekonomi Publik Magister Manajemen UNP.
- Aswin. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah)*, (online)(www.ringkas_proposal/Aswin, diakses 14 Mei 2005).
- Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. International Studies Program. Georgia State University.
- Bird, M Richard. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Irawan, Andi. 2002. *Kondisi Fiskal dan Perekonomi di Era Otda*, (online),(www.kompas.com/otonomi daerah, diakses 8 oktober 2005).
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Kaho, Joseph Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyanto. 2002. *Potensi Pajakdan Retribusi Daerah di Kawasan Sobosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*, (online), (www.pajak.pdf, diakses 30 juni 2005).
- Nugroho. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. CV. Andi offset, Yogyakarta.

- Paisal, Eko. 2003. *Pengaruh Investasi Sektor Pemerintah dan Investasi Sektor Swasta Terhadap PDRB daerah Sumbar*. Tesis: Program Ekonomi Publik Magister Manajemen UNP.
- Prakosa. Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI Volume 8 No. 2, Desember 2004.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Sidik, Machfud. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan pandangan ke depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional, Yogyakarta, 20 April 2002, (online), (http://des_fiskal.pdf, diakses 21 Mei 2004)
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar KebijakanI*. Jakarta: FE UI.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba.
- Susiyati, B Hirawan. 1994. *Peluang PemDa dalam meningkatkan PAD*. Jurnal PWK NO. 11 / Februari 1994. Yogyakarta.
- Todaro, M. 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (online), (<http://www.uu322004.pdf>, diakses 27 Mei 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, (online), (http://artikel_uu_33-2004_KeuanganDaerah.html, diakses 3 Juni 2004)
- Widarjoyo, Agus. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi ke-2.
- Wangke, Freddy. 2002. *Peranan Sektor Publik dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Era Otonomi: Suatu Pendekatan Teoritis, pada Public Choice*, (online), (www.google.com/otda diakses 6 september 2005).
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Lampiran

Hasil Regres

Dependent Variable: DOF

Method: Least Squares

Date: 04/22/11 Time: 23:56

Sample: 1994 2008

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I	3.041843	3.409959	0.892047	0.3915
G	14.70428	7.066201	2.080931	0.0616
Y	12.73855	5.134699	2.480876	0.0305
C	548.3206	104.2355	5.260400	0.0003
R-squared	0.811711	Mean dependent var		51.70933
Adjusted R-squared	0.760360	S.D. dependent var		17.03131
S.E. of regression	8.337345	Akaike info criterion		7.302545
Sum squared resid	764.6245	Schwarz criterion		7.491358
Log likelihood	-50.76909	F-statistic		15.80698
Durbin-Watson stat	1.958414	Prob(F-statistic)		0.000266

Uji heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.694714	Probability	0.662052
Obs*R-squared	5.138298	Probability	0.526202

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/23/11 Time: 00:01

Sample: 1994 2008

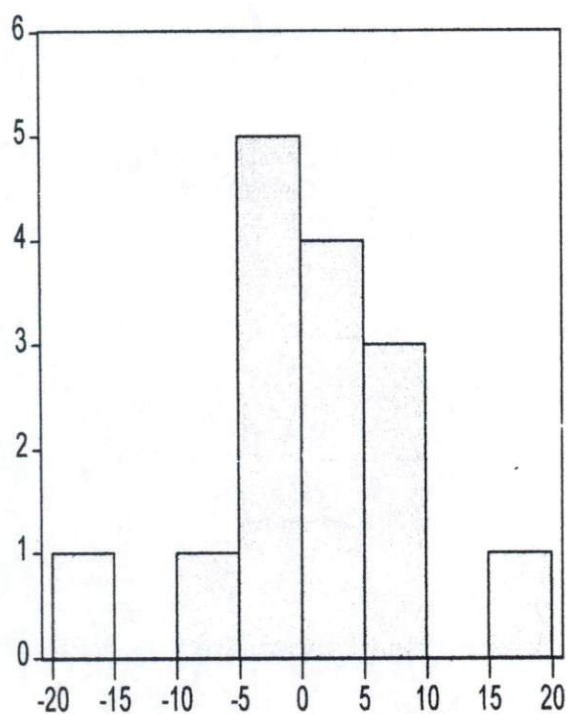
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10387.71	88170.64	0.117814	0.9091
I	1740.134	3089.184	0.563299	0.5887
I^2	32.17583	57.63445	0.558274	0.5919
G	5616.798	6954.889	0.807604	0.4427
G^2	207.3190	257.2422	0.805929	0.4436
Y	3108.689	14179.49	0.219238	0.8320
Y^2	97.06160	432.5214	0.224409	0.8281
R-squared	0.342553	Mean dependent var		50.97496
Adjusted R-squared	-0.150532	S.D. dependent var		85.87534
S.E. of regression	92.11234	Akaike info criterion		12.18862
Sum squared resid	67877.46	Schwarz criterion		12.51904
Log likelihood	-84.41465	F-statistic		0.694714
Durbin-Watson stat	2.872963	Prob(F-statistic)		0.662052

Uji multikolinieritas

	I	G	Y
I	1.000000	0.111210	0.320555
G	0.111210	1.000000	0.736833
Y	0.320555	0.736833	1.000000

Uji normalitas



Series: Residuals	
Sample 1994 2008	
Observations 15	
Mean	-6.83E-14
Median	0.495473
Maximum	15.11106
Minimum	-16.77395
Std. Dev.	7.390266
Skewness	-0.228593
Kurtosis	3.648865
Jarque-Bera	0.393778
Probability	0.821282

Hasil regres PDRB dan DOF

Dependent Variable: DOF

Method: Least Squares

Date: 06/09/11 Time: 21:02

Sample: 1995 2007

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.006843	0.002488	2.749822	0.0189
C	0.048694	0.010504	4.635815	0.0007
R-squared	0.407376	Mean dependent var		0.056757
Adjusted R-squared	0.353501	S.D. dependent var		0.045229
S.E. of regression	0.036366	Akaike info criterion		-3.649712
Sum squared resid	0.014548	Schwarz criterion		-3.562796
Log likelihood	25.72312	F-statistic		7.561520
Durbin-Watson stat	0.339368	Prob(F-statistic)		0.018897

Hasil regres Investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap DOF

Dependent Variable: DOF

Method: Least Squares

Date: 06/09/11 Time: 21:03

Sample: 1995 2007

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I	0.110566	0.026052	4.244003	0.0017
G	0.067847	0.054029	1.255742	0.2378
C	1.767212	0.408036	4.331020	0.0015
R-squared	0.686294	Mean dependent var		0.056757
Adjusted R-squared	0.623553	S.D. dependent var		0.045229
S.E. of regression	0.027750	Akaike info criterion		-4.131969
Sum squared resid	0.007701	Schwarz criterion		-4.001596
Log likelihood	29.85780	F-statistic		10.93849
Durbin-Watson stat	1.664836	Prob(F-statistic)		0.003038